

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target Pendapatan Daerah dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2013 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan pembiayaan.

3.1 Pengelolaaan pendapatan Daerah

3.2.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari

struktur pendapatan tersebut dapat dibedakan per komponen pendapatan yang telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jambi tidak membuat kebijakan terhadap sumber penerimaan baru, akan tetapi lebih mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah dan Tarif yang diatur didalamnya terdiri dari:
 - Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Air Permukaan
 - Pajak Rokok
2. Penerapan Samsat Keliling, dimana Samsat Keliling ini adalah bentuk pelayanan prima yang dilakukan oleh petugas Samsat di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota untuk mendekati Wajib Pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Pembentukan Pos Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, pada Tahun 2011 telah dibangun 4 (empat) pos Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yakni :

- Pos Pelayanan di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo
- Pos Pelayanan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi
- Pos Pelayanan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
- Pos Pelayanan di Kecamatan Tempino Kabupaten Muaro Jambi

4. Pelaksanaan Pajak Progresif, yang bertujuan untuk:

- Menjaring Bea Balik Nama bagi pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu (BBN-II).
- Meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Perhitungan besaran jumlah pajak yang terhutang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah. Pajak Progresif ini mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2011.

5. Razia rutin kendaraan bermotor, kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Pendapatan Provinsi Jambi bekerjasama dengan kepolisian dan PT. Jasa Raharja. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-II. Dalam pelaksanaannya Tim menjaring pemilik kendaraan yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kendaraan dengan nomor polisi luar Provinsi Jambi yang beroperasi di Provinsi Jambi.

Dengan tetap menjalankan kebijakan sebagaimana tersebut, maka untuk menjaga kesinambungan peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2013 diambil langkah-langkah kebijakan strategis yang antara lain meliputi, *pertama*; melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi,

kedua; melakukan *updating* data sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Dana Perimbangan, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum, *ketiga*; meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan, *keempat*; mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatannya, terutama yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah, hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan khususnya pada sisi pajak daerah selama tahun 2013.

3.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Selama tahun 2013 pendapatan daerah memperlihatkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan yang mengalami peningkatan dengan capaian realisasi sebesar 109,83 persen atau sejumlah Rp2.886.864.304.391,53 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.628.379.097.426,36. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi meningkat 8,42 persen atau sebesar Rp224.167.170.696,36 dari tahun 2012.

Pelampauan target pendapatan pada tahun 2013 tersebut, terdapat pada pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar 17,94 persen atau melebihi target sebesar Rp161.926.604.187,27 atau terealisasi sebesar Rp1.064.481.301.757,53 dari target yang ditetapkan sebesar Rp902.554.697.570,29. Untuk pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan juga terjadi pelampauan target sebesar 7,51 persen atau senilai 104.022.569.459,90 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.385.829.989.856,10 atau terealisasi sebesar Rp1.489.852.559.316,00.

Sementara untuk realisasi pendapatan yang sumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah hanya terealisasi 97,80 persen atau Rp332.530.443.318,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp339.994.410.000,00, namun jumlah tersebut melebihi realisasi tahun sebelumnya sebesar 1,91 persen atau Rp6.237.891.548,00.

Sedangkan Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan utama daerah juga mengalami peningkatan sebesar 11,08 persen dari tahun 2012 yaitu dengan kontribusi pendapatan sebesar 51,61 persen atau Rp1.489.852.559.316 dari total pendapatan Provinsi Jambi tahun 2013. Peningkatan realisasi dana perimbangan ini sejumlah Rp148.650.266.506,77 dari tahun sebelumnya.

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 36,87 persen dari total pendapatan.

Sementara pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 11,52 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2013

No	Uraian	2012	2013*	+/- (%)
1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>			
	Target	753.366.207.083,00	902.554.697.570,26	19,80
	Realisasi	995.202.289.115,94	1.064.481.301.757,53	6,96
	Lebih (kurang)	241.836.082.032,94	161.926.604.187,27	
	Realisasi (%)	132,10	117,94	
2	<i>Dana Perimbangan</i>			
	Target	1.085.733.978.686,00	1.385.829.989.856,10	27,64
	Realisasi	1.341.202.292.809,23	1.489.852.559.316,00	11,08
	Lebih (kurang)	255.468.314.123,23	104.022.569.459,90	
	Realisasi (%)	123,53	107,51	
3	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</i>			
	Target	342.189.099.660,00	339.994.410.000,00	(0,64)
	Realisasi	326.292.551.770,00	332.530.443.318,00	1,91
	Lebih (kurang)	(15.896.547.890,00)	(7.463.966.682,00)	
	Realisasi (%)	95,35	97,80	
	Jumlah pendapatan Daerah			
	Target	2.181.289.285.429,00	2.628.379.097.426,36	20,50
	Realisasi	2.662.697.133.695,17	2.886.864.304.391,53	8,42
	Realisasi (%)	122,07	109,83	

* Data sementara

Sumber : BPKAD Jambi, 2013, data diolah

Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2012 terlihat Peningkatan pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar 6,96 persen, relatif rendahnya peningkatan PAD tersebut salah satunya merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah yang menurunkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dari 7,5 persen menjadi 5 persen. Sehingga kebijakan ini secara signifikan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap rendahnya realisasi pendapatan yang bersumber dari PAD.

3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah Daerah

Secara umum pendapatan pajak daerah sangat mempengaruhi terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk tahun 2013 pendapatan pajak daerah terealisasi Rp841.884.751.200,00 atau berkontribusi 78,95 persen dari total PAD, jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 10,42 persen atau meningkat dari realisasi tahun 2012 sebesar 4,16 persen

dengan penambahan Rp33.626.240.039,00 dari tahun 2012. Selanjutnya secara berurutan PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 17,09 persen dari total PAD, adapun realisasi dari pendapatan lain-lain PAD yang sah sejumlah Rp182.213.194.229,52 atau melebihi target sebesar 189,30 persen, jumlah tersebut juga melebihi dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp38.659.327.807,30 atau 26,93 persen.

Sedangkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp26.879.028.620,01 atau sebesar 2,52 persen, jumlah tersebut belum memenuhi target yang telah atau hanya terealisasi sebesar 93,60 persen, tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terutama pada Bank Jambi tidak memenuhi target Rp28.715.827.350,00 atau hanya terealisasi sebesar 93,60 persen atau sejumlah Rp26.879.028.620,01. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2012 – 2013**

No	Uraian	2012	2013*	+/- (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah			
	Target	645.317.579.667,00	762.437.579.667,00	18,15
	Realisasi	808.258.511.161,00	841.884.751.200,00	4,16
	Realisasi (%)	125,25	110,42	
2	Hasil Retribusi Daerah			
	Target	11.162.182.916,00	15.146.578.500,00	35,70
	Realisasi	13.405.305.831,00	15.363.758.638,00	14,61
	Realisasi (%)	120,10	101,43	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	Target	9.606.827.350,00	28.715.827.350,00	198,91
	Realisasi	29.984.605.701,72	26.879.028.620,01	(10,36)
	Realisasi (%)	312,12	93,60	
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Target	87.279.617.150,00	96.254.712.053,26	10,28
	Realisasi	143.553.866.422,22	182.213.194.229,52	26,93
	Realisasi (%)	164,48	189,30	
	Jumlah Pajak Daerah			
	Target	753.366.207.083,00	902.554.697.570,26	19,80
	Realisasi	995.202.289.115,94	1.066.340.732.687,53	7,15
	Realisasi (%)	132,10	118,15	

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa, secara total terjadi peningkatan PAD dari tahun sebelumnya. Realisasi PAD pada tahun 2013 meningkat sebesar 7,15 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012.

3.2.2.2 Dana Perimbangan

Selama tahun 2013 penerimaan dari Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah terealisasi sebesar Rp1.489.852.559.316,00 atau mencapai 107,51 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.385.829.989.856,10. Dari tiga sumber pendapatan dana perimbangan tersebut, pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami pelampauan target yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu terealisasi 120,42 persen atau sejumlah Rp599.946.011.316,00, realisasi tersebut juga melampaui

dari realisasi tahun lalu sebesar 4,13 persen atau meningkat sebesar Rp23.805.498.506,77.

Selanjutnya pendapatan atas dana perimbangan dari Pendapatan Alokasi Khusus terealisasi 104,49 persen atau sebesar Rp53.328.486.000,00. Realisasi ini juga mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar 61,07 persen atau senilai Rp20.218.948.000,00. Sementara untuk sumber pendapatan dari Dana Alokasi Umum telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Rp836.578.062.000,00 jumlah tersebut meningkat sebesar 14,29 persen atau senilai Rp104.625.820.000,00 dari realisasi tahun 2012, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Perkembangan Dana Perimbangan Periode 2012-2013

No	Uraian	2012	2013*	+/- (%)
1	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak			
	Target	321.108.416.686,00	498.216.137.856,10	55,16
	Realisasi	576.140.512.809,23	599.946.011.316,00	4,13
	Lebih (Kurang)	255.032.096.123,23	101.729.873.459,90	
	Realisasi (%)	179,42	120,42	
2	Dana Alokasi Umum			
	Target	731.952.242.000,00	836.578.062.000,00	14,29
	Realisasi	731.952.242.000,00	836.578.062.000,00	14,29
	Lebih (Kurang)	-	-	
	Realisasi (%)	100,00	100,00	
3	Dana Alokasi Khusus			
	Target	32.673.320.000,00	51.035.790.000,00	56,20
	Realisasi	33.109.538.000,00	53.328.486.000,00	61,07
	Lebih (Kurang)	436.218.000,00	2.292.696.000,00	
	Realisasi (%)	101,34	104,49	
	Jumlah Dana Perimbangan			
	Target	1.085.733.978.686,00	1.385.829.989.856,10	27,64
	Realisasi	1.341.202.292.809,23	1.489.852.559.316,00	11,08
	Realisasi (%)	123,53	107,51	

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa dana alokasi umum memberikan porsi tertinggi dari penerimaan dana perimbangan Provinsi Jambi, yaitu sebesar 56,15 persen, dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 40,27 persen dan dana alokasi khusus

sebesar 3,58 persen. Selanjutnya Tabel 1.3 tersebut juga menunjukkan secara total terjadi peningkatan atas penerimaan dana perimbangan dari tahun 2012 sebesar 11,08 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada dana alokasi khusus yaitu sebesar 61,07 persen, dana alokasi umum meningkat sebesar 14,29 persen dan untuk bagi hasil pajak/bukan pajak meningkat sebesar 4,13 persen.

3.2.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2013 penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah hanya terealisasi sebesar Rp332.530.443.318,00 atau 97,80 persen dari target yang telah ditetapkan, namun secara nominal jumlah tersebut lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya yaitu terjadi peningkatan sebesar Rp6.237.891.548,00 atau meningkat 1,91 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2010-2011

No	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2012	2013*	+/- (%)
1	Dana Hibah			
	Target	1.161.409.660,00	1.000.000.000,00	(13,90)
	Realisasi	1.908.061.770,00	8.327.693.318,00	336,45
	Lebih (kurang)	746.652.110,00	7.327.693.318,00	
	Realisasi (%)	164,29	832,77	
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	Target	341.027.690.000,00	338.994.410.000,00	(0,60)
	Realisasi	324.384.490.000,00	324.202.750.000,00	(0,06)
	Lebih (kurang)	(16.643.200.000,00)	(14.791.660.000,00)	
	Realisasi (%)	95,12	95,64	
	Jumlah lain-lain pendapatan yang sah			
	Target	342.189.099.660,00	339.994.410.000,00	(0,64)
	Realisasi	326.292.551.770,00	332.530.443.318,00	1,91
	Realisasi (%)	95,35	97,80	

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

3.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan penyertaan modal/investasi dan pembayaran pokok utang.

Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Dari sisi penerimaan pembiayaan pada tahun 2012 diperoleh dari SiLPA tahun lalu (Tahun Anggaran 2011) sebesar Rp631.825.442.526,85, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp575.685.575,27. Sementara untuk tahun 2013 (data sementara), penerimaan pembiayaan sebesar Rp690.767.077.096,83. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini.

Tabel 1.5 Perkembangan Pembiayaan Periode 2012-2013

No	Pembiayaan	2012		2013*	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Surplus/(Defisit)	(585.283.934.444,85)	104.617.457.076,71	(640.142.989.536,83)	(125.373.496.466,01)
2	Penerimaan pembiayaan	631.825.442.526,85	632.401.128.102,12	690.767.077.096,83	690.767.077.096,83
	- SiLPA Tahun Sebelumnya	631.825.442.526,85	631.825.442.526,85	690.191.391.521,56	690.767.077.096,83
	- Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	575.685.575,27	575.685.575,27	-
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	46.541.508.082,00	46.251.508.082,00	50.624.087.560,00	50.564.087.560,00
	- Penyertaan Modal/Investasi	40.290.000.000,00	40.000.000.000,00	50.190.000.000,00	50.130.000.000,00
	- Pembayaran Pokok Utang	6.251.508.082,00	6.251.508.082,00	434.087.560,00	434.087.560,00
4	Pembiayaan Netto	585.283.934.444,85	586.149.620.020,12	640.142.989.536,83	640.202.989.536,83
5	SiLPA Tahun Berkenaan	-	690.767.077.096,83	-	514.829.493.070,82

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa untuk kurun waktu Tahun 2013 terdapat defisit pada APBD Provinsi Jambi sebesar

Rp125.373.496.466,01 yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan Rp2.886.864.304.391,53 dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp3.012.237.800.857,54. Jumlah defisit tersebut ditutupi oleh pembiayaan netto. Sedangkan pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan, untuk tahun 2013 pembiayaan netto tercatat Rp640.202.989.536,83. Selanjutnya untuk tahun 2013 terdapat SilPA tahun berkenaan sebesar Rp514.829.493.070,82 (angka sementara), SilPA tersebut merupakan selisih atas penjumlahan surplus/(defisit) dengan pembiayaan netto.

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD pada dasarnya merupakan instrumen untuk terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dengan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

3.2.2 Alokasi dan Realisasi Belanja

Program Prioritas Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya yang dijabarkan dalam APBD Provinsi Jambi dengan mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada seluruh SKPD dengan satuan standar tertinggi. Pada tahun 2013 untuk anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp3.268.522.086.963,19 dengan rincian alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.352.929.532.921,93 atau setara dengan 41,39 persen dari total target belanja sedangkan untuk Alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.915.592.554.041,26 atau setara dengan 58,61 persen dari total anggaran belanja daerah. Komposisi tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang mengalokasikan anggaran belanja tidak langsung sebesar 46,84 persen dan belanja langsung sebesar 53,16 persen dari total belanja daerah tahun anggaran 2012.

Dari alokasi belanja daerah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp3.012.237.800.857,54, terdiri dari Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp1.272.794.844.981,30 setara dengan 94,08 persen dan untuk Belanja Langsung terealisasi Rp1.739.442.955.876,24 atau setara dengan 90,80 persen, selanjutnya jika dibandingkan realisasi belanja daerah tahun sebelumnya terjadi penurunan secara persentase yaitu dari 92,46 persen di tahun 2012 menjadi 92,16 persen di tahun 2013 namun secara nominal terjadi peningkatan serapan belanja daerah sebesar 17,75 persen atau sejumlah Rp454.158.124.239,08 dari tahun lalu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012–2013

No	Uraian	2012	2013*	+/- (%)
1.	Belanja Tidak Langsung			
	Anggaran	1.295.848.887.154,85	1.352.929.532.921,93	4,40
	Realisasi	1.194.443.789.108,46	1.272.794.844.981,30	6,56
	Lebih (kurang)	(101.405.098.046,39)	(80.134.687.940,63)	
	Realisasi (%)	92,17	94,08	
2.	Belanja Langsung			
	Anggaran	1.470.724.332.719,00	1.915.592.554.041,26	30,25
	Realisasi	1.363.635.887.510,00	1.739.442.955.876,24	27,56
	Lebih (kurang)	(107.088.445.209,00)	(176.149.598.165,02)	
	Realisasi (%)	92,72	90,80	
	Jumlah Belanja Langsung			
	Anggaran	2.766.573.219.873,85	3.268.522.086.963,19	18,14
	Realisasi	2.558.079.676.618,46	3.012.237.800.857,54	17,75
	Realisasi (%)	92,46	92,16	

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

Selanjutnya tabel di atas juga memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan anggaran yang cukup besar pada Belanja Langsung, jika Belanja Langsung tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp1.470.724.332.719,00 meningkat sebesar 30,25 persen atau menjadi sebesar Rp1.915.592.554.041,29 di tahun 2013, begitu juga dengan serapan anggaran belanja langsung terdapat peningkatan jumlah realisasi sebesar 27,56 persen dari tahun 2012 yaitu sebesar Rp1.363.635.887.510,00 pada tahun 2012 menjadi Rp1.739.442.955.876,24 pada tahun 2013.

Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 dapat dibedakan menjadi 2 urusan yaitu Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, untuk urusan wajib dialokasikan sebesar Rp3.010.465.078.893,19 atau 92,10 persen sedangkan urusan pilihan dianggarkan sebesar Rp258.057.008.070,00 atau 7,90 persen dari jumlah belanja daerah. Penyerapan anggaran urusan wajib terealisasi sebesar 92,41 persen atau sejumlah Rp2.781.971.038.386,54 jumlah tersebut lebih besar 15,95 persen dari tahun 2012. Sedangkan untuk urusan pilihan terealisasi Rp230.266.762.471,00 atau 89,23 persen dari anggaran yang

ditetapkan, namun jumlah tersebut masih lebih besar 45,04 persen penyerapannya dari tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini.

Tabel 1.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Dirinci Perurusan Tahun 2012

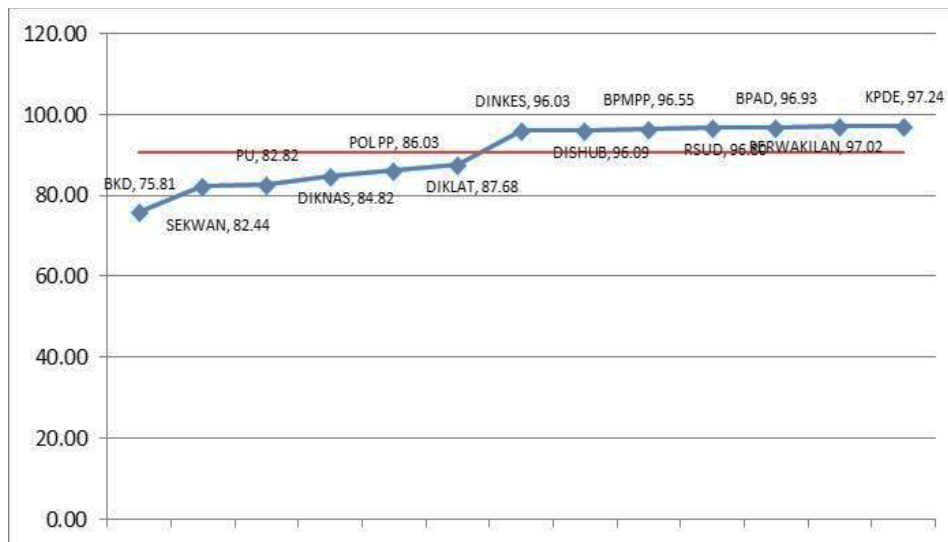
No	Uraian	2012	2013*	+/- (%)
1.	Urusan Wajib			
	Anggaran	2.594.590.259.211,85	3.010.465.078.893,19	16,03
	Realisasi	2.399.318.966.765,46	2.781.971.038.386,54	15,95
	Lebih (kurang)	(195.271.292.446,39)	(228.494.040.506,65)	
	Realisasi (%)	92,47	92,41	
2.	Urusan Pilihan			
	Anggaran	171.982.960.662,00	258.057.008.070,00	50,05
	Realisasi	158.760.709.853,00	230.266.762.471,00	45,04
	Lebih (kurang)	(13.222.250.809,00)	(27.790.245.599,00)	
	Realisasi (%)	92,31	89,23	
	Jumlah Belanja Langsung			
	Anggaran	2.766.573.219.873,85	3.268.522.086.963,19	18,14
	Realisasi	2.558.079.676.618,46	3.012.237.800.857,54	17,75
	Realisasi (%)	92,46	92,16	

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung pada penyelenggaraan Urusan Wajib tahun 2013 sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3.8 diketahui bahwa rata-rata realisasi belanja sebesar 90,98 persen, adapun unit kerja dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu pada Kantor Pengolahan Data Elektronik yang mencapai 97,24 persen sedangkan realisasi terendah yaitu sebesar 75,81 persen pada Badan Kepegawaian Daerah. Selanjutnya terdapat realisasi belanja langsung yang melebihi alokasi anggaran yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi mencapai 241,66 persen atau sebesar Rp10.237.070.809,00 dari pagu anggaran sebesar Rp4.236.088.661,00, hal ini disebabkan oleh dropping anggaran belanja hibah dari pemerintah pusat yang diperuntukkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

belanja hibah tersebut diterima setelah APBD Perubahan Tahun 2013 telah ditetapkan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber: BPKAD. Provinsi Jambi (Data Diolah)

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pelaksanaan Anggaran Urusan Wajib Tahun 2013

Gambar di atas memperlihatkan bahwa terdapat 6 (enam) SKPD yang tingkat realisasinya berada di bawah rata-rata atau dengan tingkat realisasi di bawah 90,48 persen. Sedangkan untuk realisasi di atas rata-rata terdapat pada 7 (tujuh) SKPD. Untuk lebih lengkapnya realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada Tabel 1.8 di bawah ini.

**Tabel 1.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung pada
Urusan Wajib per SKPD Tahun 2013**

No	URAIAN	JUMLAH		Selisih	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	232.513.266.400,00	197.220.221.829,00	(35.293.044.571,00)	84,82
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	19.801.989.500,00	19.015.893.072,00	(786.096.428,00)	96,03
3	Akademik Analis Kesehatan Provinsi Jambi	2.915.825.195,26	2.687.516.647,84	(228.308.547,42)	92,17
4	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	146.740.809.000,00	142.044.905.967,40	(4.695.903.032,60)	96,80
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	27.828.988.408,00	26.141.435.703,00	(1.687.552.705,00)	93,94
6	Dinas Pekerjaan Umum	885.365.214.600,00	802.075.777.193,00	(83.289.437.407,00)	90,59
7	Dinas Pekerjaan Umum (Perumahan)	15.172.492.900,00	12.565.635.600,00	(2.606.857.300,00)	82,82
8	BAPPEDA	15.800.000.000,00	15.031.564.104,00	(768.435.896,00)	95,14
9	Dinas Perhubungan	33.879.779.000,00	32.554.760.260,00	(1.325.018.740,00)	96,09
10	Badan Lingkungan Hidup	9.596.137.900,00	8.839.002.049,00	(757.135.851,00)	92,11
11	BPMP	10.267.079.600,00	9.912.831.747,00	(354.247.853,00)	96,55
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.236.088.661,00	10.237.070.809,00	6.000.982.148,00	241,66
13	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.112.888.600,00	20.833.205.542,00	(1.279.683.058,00)	94,21
14	Dinas Koperasi dan UMKM	11.192.763.000,00	10.238.627.670,00	(954.135.330,00)	91,48
15	BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu	5.100.565.000,00	4.679.565.758,00	(420.999.242,00)	91,75
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.287.155.400,00	12.429.781.917,00	(857.373.483,00)	93,55
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	19.730.706.250,00	18.201.327.250,00	(1.529.379.000,00)	92,25
18	Satuan Polisi Pamong Praja	5.815.184.000,00	5.002.722.472,00	(812.461.528,00)	86,03
19	Badan Kesbangpol	8.181.001.000,00	7.400.321.083,00	(780.679.917,00)	90,46
20	Biro Pemerintahan	3.861.657.000,00	3.446.895.985,00	(414.761.015,00)	89,26
21	Biro Hukum	2.990.000.000,00	2.864.714.750,00	(125.285.250,00)	95,81
22	Biro Humas dan Protokol	15.662.918.550,00	14.225.454.713,00	(1.437.463.837,00)	90,82
23	Biro Ekonomi Pembangunan dan SDA	4.855.320.000,00	4.444.471.385,00	(410.848.615,00)	91,54
24	Biro Kesra dan Kemasyarakatan	8.993.145.000,00	8.531.197.631,00	(461.947.369,00)	94,86
25	Biro Organisasi	3.803.170.200,00	3.474.992.960,00	(328.177.240,00)	91,37
26	Biro Umum	52.269.511.000,00	47.180.174.671,00	(5.089.336.329,00)	90,26
27	Biro Keuangan	7.552.619.850,00	6.786.768.489,00	(765.851.361,00)	89,86
28	Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah	11.351.221.150,00	10.813.815.194,00	(537.405.956,00)	95,27
29	Sekretariat Dewan	35.900.000.000,00	29.594.919.369,00	(6.305.080.631,00)	82,44
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.405.762.000,00	5.072.642.071,00	(333.119.929,00)	93,84
31	Inspektorat Provinsi	8.412.808.000,00	7.619.127.901,00	(793.680.099,00)	90,57
32	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	11.400.000.000,00	11.059.725.505,00	(340.274.495,00)	97,02
33	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	20.639.764.940,00	18.697.801.069,00	(1.941.963.871,00)	90,59
34	Sekretariat KORPRI	2.245.000.000,00	2.023.313.455,00	(221.686.545,00)	90,13
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	11.975.209.660,00	10.499.723.103,00	(1.475.486.557,00)	87,68
36	Badan Kepegawaian Daerah	5.520.553.000,00	4.185.251.423,00	(1.335.301.577,00)	75,81
37	KPID	3.159.000.000,00	2.950.911.497,00	(208.088.503,00)	93,41
38	Kantor Pengolahan Data Elektronik	8.434.821.425,00	8.201.649.356,00	(233.172.069,00)	97,24
39	Badan Perpustakaan dan Arsip	4.692.753.900,00	4.548.740.319,00	(144.013.581,00)	96,93
40	Badan Ketahanan Pangan	5.787.375.000,00	5.225.550.988,00	(561.824.012,00)	90,29
41	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	6.409.445.500,00	6.103.962.697,00	(305.482.803,00)	95,23
Jumlah		1.730.859.990.589,26	1.574.663.971.204,24	(156.196.019.385,02)	90,98

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

Tabel 1.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Urusan Wajib per SKPD Tahun 2013

No	Uraian	Jumlah		Selisih	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	19.820.952.099,00	18.534.691.115,00	(1.286.260.984,00)	93,51
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	23.559.610.923,00	22.577.616.966,00	(981.993.957,00)	95,83
3	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	56.188.820.448,00	54.036.965.795,00	(2.151.854.653,00)	96,17
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	14.874.557.918,00	14.194.122.113,00	(680.435.805,00)	95,43
5	Dinas Pekerjaan Umum	23.931.110.576,00	21.273.834.807,00	(2.657.275.769,00)	88,90
6	Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bappeda	6.660.990.384,00	6.340.749.774,00	(320.240.610,00)	95,19
8	Dinas Perhubungan	11.400.636.193,00	10.719.184.463,00	(681.451.730,00)	94,02
9	Badan Lingkungan Hidup	5.405.015.146,00	4.899.608.004,00	(505.407.142,00)	90,65
10	BPMPP	4.762.708.435,00	4.426.686.027,00	(336.022.408,00)	92,94
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.564.868.485,00	3.029.614.616,00	(535.253.869,00)	84,99
12	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.758.635.555,00	19.289.350.624,00	(3.469.284.931,00)	84,76
13	Dinas Koperasi dan UMKM	5.944.049.856,00	5.169.233.065,00	(774.816.791,00)	86,96
14	BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu	4.658.493.515,00	4.363.965.541,00	(294.527.974,00)	93,68
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.752.230.722,00	9.254.067.142,00	(498.163.580,00)	94,89
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	6.259.820.191,00	5.743.833.471,00	(515.986.720,00)	91,76
17	Satuan Polisi Pamong Praja	9.572.095.049,00	9.083.647.714,00	(488.447.335,00)	94,90
18	Badan Kesbangpol	3.770.621.468,00	3.268.402.223,00	(502.219.245,00)	86,68
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.288.078.650,00	11.927.690.927,00	(360.387.723,00)	97,07
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.667.483.480,00	1.573.143.123,00	(94.340.357,00)	94,34
21	Sekretariat Daerah				
	- Belanja Pegawai	53.545.847.037,93	48.283.528.818,00	(5.262.318.219,93)	90,17
	- Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Hibah	356.866.890.000,00	336.276.362.500,00	(20.590.527.500,00)	94,23
	- Belanja Bantuan Sosial	37.915.800.000,00	33.491.016.680,00	(4.424.783.320,00)	88,33
	- Belanja Bagi Hasil	315.958.975.000,00	315.495.683.322,00	(463.291.678,00)	99,85
	- Belanja Bantuan Keuangan	157.225.000.000,00	150.386.797.280,30	(6.838.202.719,70)	95,65
	- Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.087.471.900,00	(912.528.100,00)	69,58
22	Sekretariat Dewan	5.713.474.287,00	4.991.440.954,00	(722.033.333,00)	87,36
23	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.996.640.412,00	4.393.364.586,00	(603.275.826,00)	87,93
24	Inspektorat Provinsi	6.372.747.854,00	5.929.285.177,00	(443.462.677,00)	93,04
25	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	3.950.487.364,00	3.679.863.785,00	(270.623.579,00)	93,15
26	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	46.630.317.982,00	38.168.889.424,00	(8.461.428.558,00)	81,85
27	Sekretariat KORPRI	2.129.939.015,00	1.800.077.528,00	(329.861.487,00)	84,51
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	5.369.438.959,00	5.023.063.989,00	(346.374.970,00)	93,55
29	Badan Kepegawaian Daerah	11.669.443.266,00	8.826.381.411,00	(2.843.061.855,00)	75,64
30	KPID	1.273.585.418,00	1.175.386.114,00	(98.199.304,00)	92,29
31	Kantor Pengolahan Data Elektronik	2.491.036.921,00	1.974.576.066,00	(516.460.855,00)	79,27
32	Badan Perpustakaan dan Arsip	7.125.225.041,00	6.448.271.969,00	(676.953.072,00)	90,50
33	Badan Ketahanan Pangan	5.750.088.372,00	4.783.752.858,00	(966.335.514,00)	83,19
34	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	4.779.372.282,00	4.385.445.311,00	(393.926.971,00)	91,76
Jumlah		1.279.605.088.303,93	1.207.307.067.182,30	(72.298.021.121,63)	94,35

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

Sementara untuk Belanja Tidak Langsung pada Urusan Pilihan pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp184.732.563.452,00 dan terealisasi sebesar Rp164.778.984.672,00

atau setara dengan 89,20 persen. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung pada Urusan Pilihan dianggarkan Rp73.324.444.618 dan terealisasi sebesar 89,31 persen atau setara dengan Rp65.487.777.799,00. Adapun SKPD dengan tingkat realisasi terendah atas penyelenggaraan urusan pilihan pada belanja langsung adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi sebesar 81,42 persen dan SKPD dengan serapan anggaran tertinggi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 97,76 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.



Sumber: BPKAD Provinsi Jambi Tahun 2012 (Data Diolah)

Gambar 1.2 Grafik Realisasi Pelaksanaan Anggaran Urusan Pilihan

Gambar di atas memperlihatkan bahwa terdapat 4 (empat) SKPD yang tingkat realisasinya berada di bawah rata-rata atau dengan tingkat realisasi di bawah 89,20 persen. Sementara untuk realisasi di atas rata-rata terdapat pada 6 (enam) SKPD. Untuk lebih lengkapnya realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada Tabel 1.10 di bawah ini.

**Tabel 1.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung pada
Urusan Pilihan per SKPD Tahun 2013**

No	URAIAN	JUMLAH		Selisih	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	30.505.538.877	27.507.993.736	(2.997.545.141)	90,17
2	Dinas Perkebunan	47.567.263.250	45.470.691.942	(2.096.571.308)	95,59
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31.844.185.775	25.926.244.736	(5.917.941.039)	81,42
4	Dinas Kehutanan	12.921.404.600	11.613.236.225	(1.308.168.375)	89,88
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.124.853.500	7.464.213.489	(1.660.640.011)	81,80
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.451.360.000	3.135.897.600	(315.462.400)	90,86
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.510.520.000	31.500.420.636	(4.010.099.364)	88,71
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.433.135.250	2.243.334.857	(189.800.393)	92,20
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.814.454.800	8.391.977.375	(1.422.477.425)	85,51
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigras	1.559.847.400	1.524.974.076	(34.873.324)	97,76
Jumlah		184.732.563.452	164.778.984.672	(19.953.578.780)	89,20

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

**Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
pada Urusan Pilihan per SKPD Tahun 2013**

No	Uraian	Jumlah		Selisih	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	19.483.615.500,00	18.439.844.010,00	(1.043.771.490,00)	94,64
2	Dinas Perkebunan	11.255.766.944,00	8.981.477.256,00	(2.274.289.688,00)	79,79
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.703.096.460,00	6.631.762.574,00	(1.071.333.886,00)	86,09
4	Dinas Kehutanan	10.381.832.790,00	9.232.637.256,00	(1.149.195.534,00)	88,93
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.072.953.476,00	3.598.365.542,00	(474.587.934,00)	88,35
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.162.021.507,00	8.523.758.093,00	(638.263.414,00)	93,03
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.265.157.941,00	10.079.933.068,00	(1.185.224.873,00)	89,48
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		73.324.444.618,00	65.487.777.799,00	(7.836.666.819,00)	89,31

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

3.2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja tidak terduga. Secara total belanja tidak langsung Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp1.352.929.532.921,93 dan terealisasi sebesar Rp1.272.794.844.981,30 atau setara dengan 94,08 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.12 di bawah ini.

Tabel 1.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2012

NO	Uraian	Jumlah		%	Proporsi (%)	
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi
1.	Pegawai	481.962.867.921,93	435.057.513.299,00	90,27	35,62	34,18
2.	Subsidi	0,00	0,00		-	-
3.	Hibah	356.866.890.000,00	336.276.362.500,00	94,23	26,38	26,42
4.	Bantuan Sosial	37.915.800.000,00	33.491.016.680,00	88,33	2,80	2,63
5.	Belanja Bagi Hasil	315.958.975.000,00	315.495.683.322,00	99,85	23,35	24,79
6.	Belanja Bantuan Keuangan	157.225.000.000,00	150.386.797.280,30	95,65	11,62	11,82
7.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.087.471.900,00	69,58	0,22	0,16
Jumlah Belanja Tidak Langsung		1.352.929.532.921,93	1.272.794.844.981,30	94,08	94,08	100

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa untuk belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi, yaitu sejumlah Rp315.495.683.322,00 atau sebesar 99,85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp315.958.975.000 sedangkan belanja tidak terduga merupakan belanja dengan tingkat realisasi terendah, yaitu sebesar 69,58 persen dari alokasi belanja tidak terduga Rp3.000.000.000,00. Selanjutnya jika kita lihat proporsi anggaran belanja tidak langsung tersebut, diketahui bahwa belanja pegawai merupakan jenis belanja dengan proporsi anggaran terbesar, yaitu sebesar 35,62 persen atau sebesar Rp481.962.867.921,93 dari total anggaran pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp1.352.929.532.921,93.

Jika dibandingkan belanja tidak langsung pada tahun 2013 dengan tahun lalu, peningkatan alokasi anggaran hanya sebesar 4,22

persen yaitu Rp1.295.848.887.155,85 menjadi Rp1.352.929.532.921,93 di tahun 2013. Peningkatan terbesar terjadi pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang mencapai 49,33 persen dari tahun 2012 atau dialokasikan sebesar Rp157.225.000.000 pada tahun 2013. Peningkatan ini pada dasarnya merupakan dampak dari diserahkan berbagai urusan pembangunan yang penanganannya merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan didaerharkannya anggaran untuk pelaksanaan Program SAMISAKE kepada Kabupaten/Kota. Disisi lain, terjadi penurunan alokasi anggaran belanja tidak langsung untuk belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2012-2013

NO	Uraian Belanja	Anggaran		Realisasi		+/-	Persentase Realisasi	
		2012	2013	2012	2013		2012	2013
1.	Pegawai	477.413.747.518,20	481.962.867.921,93	446.994.502.158,00	435.057.513.299,00	0,94	93,63	90,27
2.	Subsidi	292.000.000,00	0,00	237.500.000,00	0,00	-	81,34	-
3.	Hibah	356.592.340.000,00	356.866.890.000,00	338.969.105.252,00	336.276.362.500,00	0,08	95,06	94,23
4.	Bantuan Sosial	65.500.450.000,00	37.915.800.000,00	32.070.500.000,00	33.491.016.680,00	(72,75)	48,96	88,33
5.	Belanja Bagi Hasil	306.383.149.636,65	315.958.975.000,00	298.917.433.020,71	315.495.683.322,00	3,03	97,56	99,85
6.	Belanja Bantuan Keuangan	79.667.200.000,00	157.225.000.000,00	74.860.635.677,75	150.386.797.280,30	49,33	93,97	95,65
7.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.394.113.000,00	2.087.471.900,00	(233,33)	23,94	69,58
Jumlah Belanja Tidak Langsung		1.295.848.887.154,85	1.352.929.532.921,93	1.194.443.789.108,46	1.272.794.844.981,30	4,22	92,17	94,08

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

3.2.2.2 Belanja Langsung

Komponen utama Belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan setiap tahunnya. Proporsi anggaran belanja langsung untuk tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp1.915.592.554.041,26 dari total belanja Rp3.268.522.086.963,19 atau setara dengan 58,61 persen dari total anggaran belanja daerah.

Jika dibandingkan antara anggaran belanja langsung tahun 2012 dengan tahun 2013, terjadi peningkatan alokasi sebesar 30,25 persen dari Rp1.470.724.332.719,00 pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp1.915.592.554.041,26 pada tahun 2013. Dari jumlah tersebut alokasi untuk belanja pegawai meningkat sebesar 25,30 persen, belanja barang dan jasa meningkat 17,63 persen dan untuk belanja modal meningkat sebesar 42,42 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012-2013

NO	Uraian Belanja	Anggaran		Proporsi (%)		Realisasi		% Realisasi	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013*)	2012	2013
1.	Belanja Pegawai	89.630.370.020,00	112.308.601.267,00	6,09	5,86	84.157.928.635,00	98.336.655.113,00	93,89	87,56
2.	Belanja Barang dan Jasa	657.840.900.069,00	773.795.337.335,26	44,73	40,39	596.658.216.661,00	703.123.231.097,24	90,70	90,87
3.	Belanja Modal	723.253.062.630,00	1.029.488.615.439,00	49,18	53,74	682.819.742.214,00	937.983.069.666,00	94,41	91,11
Jumlah Belanja Langsung		1.470.724.332.719,00	1.915.592.554.041,26	100,00	100,00	1.363.635.887.510,00	1.739.442.955.876,24	92,72	90,80

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa proporsi alokasi anggaran untuk jenis belanja pegawai mengalami penurunan yaitu dari 6,09 persen di tahun 2012 menjadi 5,86 persen di tahun 2013, begitu juga dengan belanja barang dan jasa mengalami penurunan proporsi alokasi anggaran yaitu dari 44,73 persen di tahun 2012 menjadi 40,39 persen di tahun 2013 sedangkan untuk alokasi belanja modal meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana proporsi alokasi untuk tahun 2012 sebesar 49,18 persen menjadi 53,74 persen dari total belanja langsung pada tahun 2013.

Selanjutnya dari total belanja langsung tersebut, dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan wajib sebesar 90,36 persen atau setara dengan Rp1.730.859.990.589,26 dan sebesar Rp184.732.563.452,00 dialokasikan untuk belanja tidak langsung

atau setara dengan 9,64 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.15 di bawah ini.

Tabel 1.15 Rincian Belanja Langsung per Urusan Tahun 2013

No	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah
1	Urusan Wajib				
	Anggaran	104.282.949.667,00	652.434.471.422,26	974.142.569.500,00	1.730.859.990.589,26
	Realisasi	91.007.735.663,00	595.483.581.436,24	888.172.654.105,00	1.574.663.971.204,24
	% Realisasi	87,27	91,27	91,17	90,98
2	Urusan Pilihan				
	Anggaran	8.025.651.600,00	121.360.865.913,00	55.346.045.939,00	184.732.563.452,00
	Realisasi	7.328.919.450,00	107.639.649.661,00	49.810.415.561,00	164.778.984.672,00
	% Realisasi	91,32	88,69	90,00	89,20
	Jumlah Anggaran	112.308.601.267,00	773.795.337.335,26	1.029.488.615.439,00	1.915.592.554.041,26
	Jumlah Realisasi	98.336.655.113,00	703.123.231.097,24	937.983.069.666,00	1.739.442.955.876,24
	% Realisasi	87,56	90,87	91,11	90,80

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

Selanjutnya tabel di atas juga memperlihatkan bahwa dari total belanja langsung tersebut, sebesar 5,86 persen atau setara dengan Rp112.308.601.267,00 dialokasikan untuk belanja pegawai, dan sebesar 40,39 persen atau setara dengan Rp773.795.337.335,26 dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, serta sebesar 53,74 persen atau setara dengan Rp1.029.488.615.439,00 dialokasikan untuk belanja modal.

Dari total anggaran belanja langsung urusan wajib sebagaimana yang diperlihatkan pada Tabel 1.15 tersebut, secara total realisasi anggaran urusan wajib terealisasi sebesar Rp1.574.663.971.204,24 atau setara dengan 90,98 persen. Sementara untuk urusan pilihan yang dialokasikan sebesar Rp184.732.563.452,00 atau terealisasi sebesar 89,20 persen atau sebesar Rp164.778.984.672,00. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.16 di bawah ini.

Tabel 1.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013

No	Uraian	Jumlah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	4	4
A. Urusan Wajib		1.730.859.990.589,26	1.574.663.971.204,24	156.196.019.385,02	90,98
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	232.513.266.400,00	197.220.221.829,00	35.293.044.571,00	84,82
	Belanja Pegawai	21.185.861.500,00	16.955.503.850,00	4.230.357.650,00	80,03
	Belanja Barang dan Jasa	176.286.258.300,00	148.518.320.245,00	27.767.938.055,00	84,25
	Belanja Modal	35.041.146.600,00	31.746.397.734,00	3.294.748.866,00	90,60
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	19.801.989.500,00	19.015.893.072,00	786.096.428,00	96,03
	Belanja Pegawai	2.161.976.500,00	2.004.289.000,00	157.687.500,00	92,71
	Belanja Barang dan Jasa	14.127.683.000,00	13.621.520.772,00	506.162.228,00	96,42
	Belanja Modal	3.512.330.000,00	3.390.083.300,00	122.246.700,00	96,52
3	Akademik Analis Kesehatan Provinsi Jam	2.915.825.195,26	2.687.516.647,84	228.308.547,42	92,17
	Belanja Pegawai	1.370.627.125,00	1.301.744.250,00	68.882.875,00	94,97
	Belanja Barang dan Jasa	1.039.020.070,26	1.385.772.397,84	(346.752.327,58)	133,37
	Belanja Modal	506.178.000,00	0,00	506.178.000,00	0,00
4	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	146.740.809.000,00	142.044.905.967,40	4.695.903.032,60	96,80
	Belanja Pegawai	31.455.707.820,00	26.948.391.447,00	4.507.316.373,00	85,67
	Belanja Barang dan Jasa	48.996.919.400,00	54.278.146.908,40	(5.281.227.508,40)	110,78
	Belanja Modal	66.288.181.780,00	60.818.367.612,00	5.469.814.168,00	91,75
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	27.828.988.408,00	26.141.435.703,00	1.687.552.705,00	93,94
	Belanja Pegawai	1.743.020.400,00	1.591.710.300,00	151.310.100,00	91,32
	Belanja Barang dan Jasa	18.299.051.908,00	17.312.633.003,00	986.418.905,00	94,61
	Belanja Modal	7.786.916.100,00	7.237.092.400,00	549.823.700,00	92,94

Tabel 3.16(lanjutan)

No	Uraian	Jumlah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	4	4
6	Dinas Pekerjaan Umum	885.365.214.600,00	802.075.777.193,00	83.289.437.407,00	90,59
	Belanja Pegawai	4.420.796.400,00	4.225.357.600,00	195.438.800,00	95,58
	Belanja Barang dan Jasa	118.348.989.700,00	111.936.328.416,00	6.412.661.284,00	94,58
	Belanja Modal	762.595.428.500,00	685.914.091.177,00	76.681.337.323,00	89,94
7	Dinas PU (Perumahan)	15.172.492.900,00	12.565.635.600,00	2.606.857.300,00	82,82
	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	993.655.000,00	987.047.000,00	6.608.000,00	99,33
	Belanja Modal	14.170.837.900,00	11.570.588.600,00	2.600.249.300,00	81,65
8	BAPPEDA	15.800.000.000,00	15.031.564.104,00	768.435.896,00	95,14
	Belanja Pegawai	1.209.717.900,00	1.090.586.950,00	119.130.950,00	90,15
	Belanja Barang dan Jasa	12.051.604.700,00	11.518.038.154,00	533.566.546,00	95,57
	Belanja Modal	2.538.677.400,00	2.422.939.000,00	115.738.400,00	95,44
9	Dinas Perhubungan	33.879.779.000,00	32.554.760.260,00	1.325.018.740,00	96,09
	Belanja Pegawai	1.115.045.000,00	793.729.400,00	321.315.600,00	71,18
	Belanja Barang dan Jasa	12.643.200.950,00	11.838.479.548,00	804.721.402,00	93,64
	Belanja Modal	20.121.533.050,00	19.922.551.312,00	198.981.738,00	99,01
10	Badan Lingkungan Hidup	9.596.137.900,00	8.839.002.049,00	757.135.851,00	92,11
	Belanja Pegawai	465.207.000,00	426.197.000,00	39.010.000,00	91,61
	Belanja Barang dan Jasa	3.739.017.410,00	3.601.686.029,00	137.331.381,00	96,33
	Belanja Modal	5.391.913.490,00	4.811.119.020,00	580.794.470,00	89,23
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pe	10.267.079.600,00	9.912.831.747,00	354.247.853,00	96,55
	Belanja Pegawai	1.229.245.000,00	1.181.325.000,00	47.920.000,00	96,10
	Belanja Barang dan Jasa	8.369.141.000,00	8.076.836.247,00	292.304.753,00	96,51
	Belanja Modal	668.693.600,00	654.670.500,00	14.023.100,00	97,90

Tabel 3.16(lanjutan)

No	Uraian	Jumlah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	4	4
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.236.088.661,00	10.237.070.809,00	(6.000.982.148,00)	241,66
	Belanja Pegawai	551.313.500,00	539.595.200,00	11.718.300,00	97,87
	Belanja Barang dan Jasa	3.024.329.161,00	2.536.544.346,00	487.784.815,00	83,87
	Belanja Modal	660.446.000,00	7.160.931.263,00	(6.500.485.263,00)	1.084,26
13	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmig	22.112.888.600,00	20.833.205.542,00	1.279.683.058,00	94,21
	Belanja Pegawai	3.218.809.500,00	3.155.781.500,00	63.028.000,00	98,04
	Belanja Barang dan Jasa	13.074.491.600,00	11.931.418.042,00	1.143.073.558,00	91,26
	Belanja Modal	5.819.587.500,00	5.746.006.000,00	73.581.500,00	98,74
14	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan M	11.192.763.000,00	10.238.627.670,00	954.135.330,00	91,48
	Belanja Pegawai	672.275.000,00	619.434.400,00	52.840.600,00	92,14
	Belanja Barang dan Jasa	9.121.983.000,00	8.324.039.895,00	797.943.105,00	91,25
	Belanja Modal	1.398.505.000,00	1.295.153.375,00	103.351.625,00	92,61
15	BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu	5.100.565.000,00	4.679.565.758,00	420.999.242,00	91,75
	Belanja Pegawai	464.367.000,00	444.397.000,00	19.970.000,00	95,70
	Belanja Barang dan Jasa	4.266.998.000,00	3.796.868.758,00	470.129.242,00	88,98
	Belanja Modal	369.200.000,00	438.300.000,00	(69.100.000,00)	118,72
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.287.155.400,00	12.429.781.917,00	857.373.483,00	93,55
	Belanja Pegawai	1.909.365.100,00	1.809.254.600,00	100.110.500,00	94,76
	Belanja Barang dan Jasa	9.533.747.300,00	8.802.046.217,00	731.701.083,00	92,33
	Belanja Modal	1.844.043.000,00	1.818.481.100,00	25.561.900,00	98,61
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Ja	19.730.706.250,00	18.201.327.250,00	1.529.379.000,00	92,25
	Belanja Pegawai	2.784.295.000,00	2.571.336.700,00	212.958.300,00	92,35
	Belanja Barang dan Jasa	13.184.891.810,00	12.005.569.620,00	1.179.322.190,00	91,06
	Belanja Modal	3.761.519.440,00	3.624.420.930,00	137.098.510,00	96,36
18	Satuan Polisi Pamong Praja	5.815.184.000,00	5.002.722.472,00	812.461.528,00	86,03
	Belanja Pegawai	1.874.224.400,00	1.570.277.900,00	303.946.500,00	83,78
	Belanja Barang dan Jasa	3.373.457.400,00	2.889.585.372,00	483.872.028,00	85,66
	Belanja Modal	567.502.200,00	542.859.200,00	24.643.000,00	95,66

Tabel 3.16(lanjutan)

No	Uraian	Jumlah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	4	4
19	Badan Kesbangpol	8.181.001.000,00	7.400.321.083,00	780.679.917,00	90,46
	Belanja Pegawai	1.155.266.000,00	1.130.493.450,00	24.772.550,00	97,86
	Belanja Barang dan Jasa	6.679.565.000,00	5.943.627.633,00	735.937.367,00	88,98
	Belanja Modal	346.170.000,00	326.200.000,00	19.970.000,00	94,23
20	Biro Pemerintahan	3.861.657.000,00	3.446.895.985,00	414.761.015,00	89,26
	Belanja Pegawai	637.066.500,00	522.774.500,00	114.292.000,00	82,06
	Belanja Barang dan Jasa	3.224.590.500,00	2.924.121.485,00	300.469.015,00	90,68
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	
21	Biro Hukum	2.990.000.000,00	2.864.714.750,00	125.285.250,00	95,81
	Belanja Pegawai	986.452.800,00	943.463.200,00	42.989.600,00	95,64
	Belanja Barang dan Jasa	1.900.629.200,00	1.818.923.550,00	81.705.650,00	95,70
	Belanja Modal	102.918.000,00	102.328.000,00	590.000,00	99,43
22	Biro Humas dan Protokol	15.662.918.550,00	14.225.454.713,00	1.437.463.837,00	90,82
	Belanja Pegawai	686.202.100,00	492.595.301,00	193.606.799,00	71,79
	Belanja Barang dan Jasa	14.122.659.950,00	13.180.113.162,00	942.546.788,00	93,33
	Belanja Modal	854.056.500,00	552.746.250,00	301.310.250,00	64,72
23	Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber	4.855.320.000,00	4.444.471.385,00	410.848.615,00	91,54
	Belanja Pegawai	658.318.600,00	455.669.255,00	202.649.345,00	69,22
	Belanja Barang dan Jasa	4.174.001.400,00	3.966.092.130,00	207.909.270,00	95,02
	Belanja Modal	23.000.000,00	22.710.000,00	290.000,00	98,74
24	Biro Kesra dan Kemasyarakatan	8.993.145.000,00	8.531.197.631,00	461.947.369,00	94,86
	Belanja Pegawai	3.139.798.300,00	3.032.319.500,00	107.478.800,00	96,58
	Belanja Barang dan Jasa	5.737.250.700,00	5.384.888.631,00	352.362.069,00	93,86
	Belanja Modal	116.096.000,00	113.989.500,00	2.106.500,00	98,19
25	Biro Organisasi	3.803.170.200,00	3.474.992.960,00	328.177.240,00	91,37
	Belanja Pegawai	886.933.000,00	809.063.500,00	77.869.500,00	91,22
	Belanja Barang dan Jasa	2.725.170.300,00	2.517.394.460,00	207.775.840,00	92,38
	Belanja Modal	191.066.900,00	148.535.000,00	42.531.900,00	77,74

Tabel 3.16(lanjutan)

No	Uraian	Jumlah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	4	4
26	Biro Umum	52.269.511.000,00	47.180.174.671,00	5.089.336.329,00	90,26
	Belanja Pegawai	4.473.334.500,00	4.061.818.700,00	411.515.800,00	90,80
	Belanja Barang dan Jasa	36.044.807.100,00	32.019.904.161,00	4.024.902.939,00	88,83
	Belanja Modal	11.751.369.400,00	11.098.451.810,00	652.917.590,00	94,44
27	Biro Keuangan	7.552.619.850,00	6.786.768.489,00	765.851.361,00	89,86
	Belanja Pegawai	1.969.784.410,00	1.803.575.800,00	166.208.610,00	91,56
	Belanja Barang dan Jasa	5.283.705.910,00	4.797.661.689,00	486.044.221,00	90,80
	Belanja Modal	299.129.530,00	185.531.000,00	113.598.530,00	62,02
28	Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Dae	11.351.221.150,00	10.813.815.194,00	537.405.956,00	95,27
	Belanja Pegawai	1.816.887.292,00	1.757.005.692,00	59.881.600,00	96,70
	Belanja Barang dan Jasa	5.115.366.288,00	4.664.824.429,00	450.541.859,00	91,19
	Belanja Modal	4.418.967.570,00	4.391.985.073,00	26.982.497,00	99,39
29	Sekretariat Dewan	35.900.000.000,00	29.594.919.369,00	6.305.080.631,00	82,44
	Belanja Pegawai	1.088.403.000,00	966.806.750,00	121.596.250,00	88,83
	Belanja Barang dan Jasa	34.159.197.000,00	28.007.440.619,00	6.151.756.381,00	81,99
	Belanja Modal	652.400.000,00	620.672.000,00	31.728.000,00	95,14
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Dae	5.405.762.000,00	5.072.642.071,00	333.119.929,00	93,84
	Belanja Pegawai	1.081.313.140,00	1.030.935.000,00	50.378.140,00	95,34
	Belanja Barang dan Jasa	3.753.848.860,00	3.474.297.241,00	279.551.619,00	92,55
	Belanja Modal	570.600.000,00	567.409.830,00	3.190.170,00	99,44
31	Inspektorat Provinsi	8.412.808.000,00	7.619.127.901,00	793.680.099,00	90,57
	Belanja Pegawai	365.538.400,00	247.813.900,00	117.724.500,00	67,79
	Belanja Barang dan Jasa	7.763.769.600,00	7.100.156.646,00	663.612.954,00	91,45
	Belanja Modal	283.500.000,00	271.157.355,00	12.342.645,00	95,65
32	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	11.400.000.000,00	11.059.725.505,00	340.274.495,00	97,02
	Belanja Pegawai	1.042.691.000,00	974.363.450,00	68.327.550,00	93,45
	Belanja Barang dan Jasa	8.331.919.000,00	8.096.139.356,00	235.779.644,00	97,17
	Belanja Modal	2.025.390.000,00	1.989.222.699,00	36.167.301,00	98,21

Tabel 3.16(lanjutan)

No	Uraian	Jumlah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	4	4
33	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	20.639.764.940,00	18.697.801.069,00	1.941.963.871,00	90,59
	Belanja Pegawai	1.204.532.000,00	1.103.822.900,00	100.709.100,00	91,64
	Belanja Barang dan Jasa	12.757.995.500,00	11.370.776.469,00	1.387.219.031,00	89,13
	Belanja Modal	6.677.237.440,00	6.223.201.700,00	454.035.740,00	93,20
34	Sekretariat KORPRI	2.245.000.000,00	2.023.313.455,00	221.686.545,00	90,13
	Belanja Pegawai	364.758.500,00	275.748.700,00	89.009.800,00	75,60
	Belanja Barang dan Jasa	1.778.179.100,00	1.648.749.905,00	129.429.195,00	92,72
	Belanja Modal	102.062.400,00	98.814.850,00	3.247.550,00	96,82
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	11.975.209.660,00	10.499.723.103,00	1.475.486.557,00	87,68
	Belanja Pegawai	869.888.150,00	731.774.650,00	138.113.500,00	84,12
	Belanja Barang dan Jasa	5.695.834.410,00	4.611.183.323,00	1.084.651.087,00	80,96
	Belanja Modal	5.409.487.100,00	5.156.765.130,00	252.721.970,00	95,33
36	Badan Kepegawaian Daerah	5.520.553.000,00	4.185.251.423,00	1.335.301.577,00	75,81
	Belanja Pegawai	1.085.381.400,00	575.571.798,00	509.809.602,00	53,03
	Belanja Barang dan Jasa	3.868.997.900,00	3.058.661.625,00	810.336.275,00	79,06
	Belanja Modal	566.173.700,00	551.018.000,00	15.155.700,00	97,32
37	KPID	3.159.000.000,00	2.950.911.497,00	208.088.503,00	93,41
	Belanja Pegawai	720.892.180,00	696.144.000,00	24.748.180,00	96,57
	Belanja Barang dan Jasa	1.755.547.820,00	1.577.436.197,00	178.111.623,00	89,85
	Belanja Modal	682.560.000,00	677.331.300,00	5.228.700,00	99,23
38	Kantor Pengolahan Data Elektronik	8.434.821.425,00	8.201.649.356,00	233.172.069,00	97,24
	Belanja Pegawai	328.557.500,00	324.193.000,00	4.364.500,00	98,67
	Belanja Barang dan Jasa	5.494.557.525,00	5.293.860.356,00	200.697.169,00	96,35
	Belanja Modal	2.611.706.400,00	2.583.596.000,00	28.110.400,00	98,92
39	Badan Perpustakaan dan Arsip	4.692.753.900,00	4.548.740.319,00	144.013.581,00	96,93
	Belanja Pegawai	595.431.750,00	584.236.870,00	11.194.880,00	98,12
	Belanja Barang dan Jasa	2.725.922.150,00	2.609.609.279,00	116.312.871,00	95,73
	Belanja Modal	1.371.400.000,00	1.354.894.170,00	16.505.830,00	98,80

Tabel 3.16(lanjutan)

No	Uraian	Jumlah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	4	4
B. Urusan Pilihan		184.732.563.452,00	164.778.984.672,00	19.953.578.780,00	89,20
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	30.505.538.877,00	27.507.993.736,00	2.997.545.141,00	90,17
	Belanja Pegawai	1.519.238.400,00	1.451.727.400,00	67.511.000,00	95,56
	Belanja Barang dan Jasa	15.134.866.461,00	13.502.198.336,00	1.632.668.125,00	89,21
	Belanja Modal	13.851.434.016,00	12.554.068.000,00	1.297.366.016,00	90,63
2	Dinas Perkebunan	47.567.263.250,00	45.470.691.942,00	2.096.571.308,00	95,59
	Belanja Pegawai	523.294.400,00	506.360.400,00	16.934.000,00	96,76
	Belanja Barang dan Jasa	41.013.965.387,00	39.261.201.842,00	1.752.763.545,00	95,73
	Belanja Modal	6.030.003.463,00	5.703.129.700,00	326.873.763,00	94,58
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31.844.185.775,00	25.926.244.736,00	5.917.941.039,00	81,42
	Belanja Pegawai	1.860.849.000,00	1.768.110.600,00	92.738.400,00	95,02
	Belanja Barang dan Jasa	16.410.831.775,00	13.550.747.256,00	2.860.084.519,00	82,57
	Belanja Modal	13.572.505.000,00	10.607.386.880,00	2.965.118.120,00	78,15
4	Dinas Kehutanan	12.921.404.600,00	11.613.236.225,00	1.308.168.375,00	89,88
	Belanja Pegawai	727.035.400,00	539.082.000,00	187.953.400,00	74,15
	Belanja Barang dan Jasa	8.876.391.440,00	7.869.176.725,00	1.007.214.715,00	88,65
	Belanja Modal	3.317.977.760,00	3.204.977.500,00	113.000.260,00	96,59
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.124.853.500,00	7.464.213.489,00	1.660.640.011,00	81,80
	Belanja Pegawai	437.299.400,00	279.270.400,00	158.029.000,00	63,86
	Belanja Barang dan Jasa	3.427.448.600,00	2.121.760.403,00	1.305.688.197,00	61,90
	Belanja Modal	5.260.105.500,00	5.063.182.686,00	196.922.814,00	96,26

Tabel 3.16(lanjutan)

No	Uraian	Jumlah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	4	4
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.451.360.000,00	3.135.897.600,00	315.462.400,00	90,86
	Belanja Pegawai	211.512.000,00	156.859.000,00	54.653.000,00	74,16
	Belanja Barang dan Jasa	3.119.848.000,00	2.859.413.600,00	260.434.400,00	91,65
	Belanja Modal	120.000.000,00	119.625.000,00	375.000,00	99,69
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.510.520.000,00	31.500.420.636,00	4.010.099.364,00	88,71
	Belanja Pegawai	1.633.806.000,00	1.575.324.500,00	58.481.500,00	96,42
	Belanja Barang dan Jasa	23.186.464.000,00	19.771.965.641,00	3.414.498.359,00	85,27
	Belanja Modal	10.690.250.000,00	10.153.130.495,00	537.119.505,00	94,98
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.433.135.250,00	2.243.334.857,00	189.800.393,00	92,20
	Belanja Pegawai	240.460.000,00	227.830.000,00	12.630.000,00	94,75
	Belanja Barang dan Jasa	2.097.675.250,00	1.950.659.857,00	147.015.393,00	92,99
	Belanja Modal	95.000.000,00	64.845.000,00	30.155.000,00	68,26
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.814.454.800,00	8.391.977.375,00	1.422.477.425,00	85,51
	Belanja Pegawai	839.823.000,00	792.021.150,00	47.801.850,00	94,31
	Belanja Barang dan Jasa	6.565.861.600,00	5.259.885.925,00	1.305.975.675,00	80,11
	Belanja Modal	2.408.770.200,00	2.340.070.300,00	68.699.900,00	97,15
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.559.847.400,00	1.524.974.076,00	34.873.324,00	97,76
	Belanja Pegawai	32.334.000,00	32.334.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.527.513.400,00	1.492.640.076,00	34.873.324,00	97,72
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah A + B		1.915.592.554.041,26	1.739.442.955.876,24	176.149.598.165,02	90,80

* Data sementara

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2013, Data diolah

